

**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa  
Dalam Pembentukan Peraturan Desa  
( Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk )**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Devina Apriliana  
05020420028**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Devina Apriliana  
Nim :05020420028  
Fakultas/Prodi :Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN BPD  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI  
KASUS DI DESA BERBEK KECAMATAN BERBEK  
KABUPATEN NGANJUK).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 November 2023

Saya yang menyatakan,



DEVINA APRILIANA

NIM.05020420028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUSN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh:

Nama :Devina Apriliana  
Nim :05020420028  
Judul : TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN BPD  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI  
KASUS DI DESA BERBEK KECAMATAN BERBEK  
KABUPATEN NGANJUK).

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 23 November 2023

Pembimbing,



**Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.**

**NIP. 196310151991031003**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Devina Apriliana  
NIM : 05020420028

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

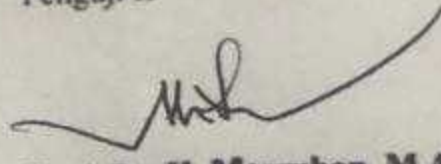
**Majelis Munaqosah Skripsi :**

Penguji I



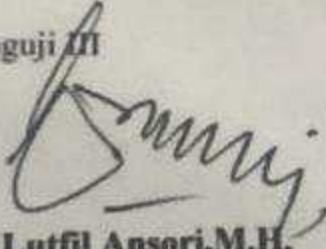
**Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.**  
NIP. 196310151991031003

Penguji II



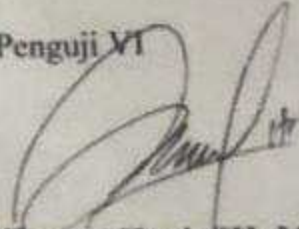
**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.**  
NIP. 195904041988031003

Penguji III



**Dr. Lutfil Ansori, M.H.**  
NIP. 885552786541000

Penguji VI



**Daman Huri, SH, M.Hum.**  
NIP. 202111014

Surabaya, 3 Januari 2024


Mengesahkan,

Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jember, Jawa Timur



  
**Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001

## PERNYATAAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devina Apriliana  
NIM : 050204200028  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/PUBLIK ISLAM  
E-mail address : Devinaapriliana05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( Devina Apriliana )

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) untuk menjawab Peran Badan Permusyawaratan Desa implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturriyah* terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk menemukan fakta-fakta di lapangan dan mengidentifikasi masalah yang ada. Dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, serta mempelajari faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan Analisis dokumen desa, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk secara umum sudah melaksanakan perannya dan telah menjalankan fungsi dan kewajiban, Namun belum sepenuhnya terwujud dengan berbagai hambatan. Kedua belum adanya pengaplikasian Penerapan prinsip *Fiqh Siyasah* dalam pembentukan peraturan desa, mengingat bahwa Di Desa Berbek mayoritas beragama islam hal ini dapat menjadi relevan dan bermanfaat akan menjadi lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam dan memastikan pemenuhan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang Islami.

Saran Meningkatkan kinerja perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja, memperbanyak menjalin komunikasi dengan pihak lain seperti komunitas masyarakat, pemertintahan daerah untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam proses pembentukan peraturan desa dapat melibatkan pakar hukum Islam, tokoh masyarakat, dan ahli fiqh untuk memberikan pandangan dan nasehat yang dapat memperkaya pemahaman BPD dalam menyusun peraturan desa yang berkualitas.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>  | <b>III</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR.....</b>  | <b>V</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>VI</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>VIII</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>X</b>    |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>  | <b>XII</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Identikasi Masalah dan Batasan Masalah .....  | 6           |
| C. Rumusan Masalah .....   | 7           |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 7           |
| E. Manfaat Hasil Penelitian.....   | 8           |
| F. Penelitian Terdahulu .....  | 9           |
| G. Definisi Operasional .....  | 13          |
| H. Metode Penelitian .....   | 17          |
| I. Sistematika Pembahasan .....  | 22          |
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS <i>FIQH SIYASAH</i> BADAN<br/>PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN<br/>PERATURAN DESA.....</b> | <b>25</b>   |
| A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> h Dalam Pembentukan Peraturan Desa.....   | 25          |
| B. <i>As-Sulthah At-Tashri'yyah</i> .....  | 29          |
| B. Gambaran Umum BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa .....  | 31          |
| <b>BAB III PERAN BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA ..</b>   | <b>36</b>   |
| A. Profil Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk .....   | 36          |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Pemaparan Penggalian Data Penelitian Lapangan.....  | 38        |
| C. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Berbek.....  | 49        |
| D. Kendala Yang Dihadapi BPD dan Perangkat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.....                    | 57        |
| <b>BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PERAN BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA BERBEK, KEC. BERBEK KAB. NGANJUK).....</b>   | <b>62</b> |
| A. Analisis Peran BPD di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. .... | 62        |
| B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. ....                   | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>79</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 79        |
| B. Saran .....   | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>81</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>84</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>  | <b>95</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Otonomi Desa’ (Studi Pada Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang),” 25 April 2015.
- Apriani, Reka, dan Abdul Sakban. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X| Vol. 6 No. 2 September 2018.
- Aldi Irawan, and Abdul Hafid. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Responsif Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 65–76. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419>.
- Dahsahua, A. “Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat Berdasarkan Undang-Undang,” 2023. <https://repository.unja.ac.id/46168/>.
- Djazuli, *"Fiqh Siyasaḥ : Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi Revisi"* ( Bogor: Kencana 2006 )
- Elviandri, and Indra Perdana. “Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” *JOURNAL EQUITABLE* 6, no. 1 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>.
- Fauziah, Lila Ayu. “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 1–12. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/593>.
- Hukum, E Yuhendra - UNIFIKASI: Jurnal Ilmu, and undefined 2016. “BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec ....” *Journal.Uniku.Ac.Id*. Accessed November 30, 2023. <http://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/410>.
- Kadir, Munawir. *"Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa*

*Pa'Nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa),*" Skripsi: Universitas Alauddin Makasar 2016.

Kaawoan, Johannis E. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa." *Politico* 9, no. 4 (2020): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31284>.

Kurniawan, Hasim. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri," 2023. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/31556>.

Marsela, Reka. "*Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyash (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)*", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018

Marhum, Umar, and Maja Meronda. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 12 (2021): 141–49. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>.

Muslimah, Muslimah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4987–99. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1231>.

Nugraha, Imam Arya. "Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 2018." *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1507>.

Prasetya, Ahadi Fajrin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>.

Prayoga Saputra. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)," 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25010>.

- Setiawati, Setiawati. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2018): 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>.
- Sitepu, A P. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo)*, 2018. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9200>.
- Sonny Walangitan, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat), Bandar Lampung: Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) (2022)”.
- Studi, Suatu, Watudambo Dua, Kec Kauditan, and Kab Minahasa. “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa.” *Journals.Usm.Ac.Id* 1, no. 1. Accessed November 30, 2023. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/6833>.
- Sudiby, B J. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. April (2013): 18–35. [https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI\\_file/Data\\_Backup/Done\\_To\\_BackUp/415-790-1-SM.pdf](https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Data_Backup/Done_To_BackUp/415-790-1-SM.pdf).
- Suyatmi. “Peran BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar,” 2004. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/21057>.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, (2021).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Wijayanto, Dody Eko. “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 40. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>.